

# **PENGARUH PEMERINTAH KELURAHAN PONDANG UNTUK MENINGKATKAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMBANGUNAN**

*Oleh*  
**JEANY KAPARANG**

## **ABSTRAK**

*Pembangunan yang ada di kelurahan Pondang tidak terlepas dari peranan pemerintah & masyarakat. Tapi apakah masyarakat efektif atau terlibat langsung dalam proses perencanaan & pelaksanaan pembangunan sehingga pembangunan bisa terlaksana. Pada kenyataannya banyak masyarakat yang tidak peduli dengan pembangunan yang ada. Entah dikarenakan sibuk bekerja atau memang tidak mau ambil pusing masyarakat hanya sibuk dengan urusan mereka masing-masing tanpa berpartisipasi dalam pembangunan. Ini juga bisa disebabkan kelalaian dari pemerintah kelurahan setempat yang kurang bersosialisasi dengan masyarakat sehingga kurangnya partisipasi.*

*Keberhasilan pelaksanaan pembangunan masyarakat sangat bergantung kepada peranan pemerintah dan masyarakatnya. Tanpa melibatkan masyarakat, pemerintah tidak akan dapat mencapai hasil pembangunan secara optimal. Pembangunan hanya akan melahirkan produk-produk baru yang kurang berarti bagi masyarakatnya, tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakatnya. Demikian pula sebaliknya, tanpa peran yang optimal dari pemerintah, pembangunan akan berjalan secara tidak teratur dan tidak terarah, yang akhirnya akan menimbulkan permasalahan baru. Selain memerlukan keterlibatan masyarakat, pembangunan juga membutuhkan strategi yang tepat agar dapat lebih efisien dari segi pembiayaan dan efektif dari segi hasil.*

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Dengan dikeluarkannya Undang-undang Nomor 12 tahun 2008 pasal 1 butir n, kelurahan adalah wilayah kerja lurah sebagai perangkat daerah kabupaten atau daerah kota di bawah kecamatan. Sehubungan dengan hal tersebut, maka kelurahan tidak bisa terlepas dari kebijakan-kebijakan yang diambil oleh pemerintah kabupaten (termasuk pembinaan dan pengawasan aparatnya). Begitu juga dengan pelaksanaan

otonomi daerah, kelurahan merupakan bagian dari pelaksanaan otonomi daerah itu sendiri.

Terdapat dua hal yang harus dilaksanakan oleh pemerintah, pertama : perlu aspiratif terhadap aspirasi-aspirasi yang disampaikan oleh masyarakatnya, dan perlu sensitive terhadap kebutuhan rakyatnya. Pemerintah perlu mengetahui apa yang dibutuhkan oleh rakyatnya serta mau mendengarkan apa kemauannya. Kedua : pemerintah perlu melibatkan segenap kemauan dan kemampuan yang dimiliki oleh masyarakat dalam melaksanakan pembangunan. Dengan kata lain pemerintah perlu menempatkan rakyat sebagai subjek pembangunan, bukan hanya sebagai objek pembangunan. Dengan demikian dapat diharapkan adanya kerjasama yang baik antara pemerintah kelurahan dengan masyarakat agar dapat mengatasi segala kemungkinan-kemungkinan yang akan datang.

Sebagai usaha untuk meningkatkan dan memantapkan kesadaran masyarakat dalam berpartisipasi dapat ditempuh melalui sosialisasi kepada seluruh masyarakat dan bukti nyata dari semua yang menjadi keinginan masyarakat. Cara ini bermaksud untuk meningkatkan kesadaran setiap warga termasuk dalam kehidupan berbangsa dan bernegara dalam rangka memantapkan pembangunan bagi segenap masyarakat Indonesia demi terciptanya suasana dan harapan sesuai dengan cita-cita kemerdekaan bangsa. Pengaruh pemerintah dilakukan secara benar pada hakekatnya adalah usaha untuk meningkatkan kesadaran partisipasi masyarakat sebagai warga negara yang baik.

## **B. Rumusan Masalah**

Dalam penelitian ini dirumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pemerintah kelurahan Pondang dalam meningkatkan partisipasi masyarakat?
2. Faktor-faktor apa saja yang pemerintah kelurahan Pondang lakukan agar dapat mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam pembangunan?

## **C. Tujuan**

Sesuai dengan masalah di atas yang telah dikemukakan sebelumnya maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana pemerintah kelurahan Pondang dalam meningkatkan partisipasi masyarakat.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang pemerintah kelurahan Pondang lakukan agar dapat mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam pembangunan.

#### **D. Tinjauan Pustaka**

##### **a. Pemerintah Kelurahan**

Pemerintah kelurahan dipimpin oleh seorang Lurah yang berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil. Kelurahan merupakan unit pemerintahan terkecil setingkat dengan desa. Berbeda dengan desa, kelurahan memiliki hak mengatur wilayahnya lebih terbatas. Dalam perkembangannya, sebuah desa dapat diubah statusnya menjadi kelurahan. Kelurahan sebagai subsistem Kabupaten/Kota merupakan pelaksana pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan yang paling dekat bersentuhan dengan rakyat.

##### **b. Partisipasi Masyarakat**

Partisipasi masyarakat adalah ikut sertanya seluruh anggota masyarakat dalam memecahkan permasalahan-permasalahan masyarakat tersebut. Partisipasi masyarakat di bidang kesehatan berarti keikutsertaan seluruh anggota masyarakat dalam memecahkan masalah kesehatan mereka sendiri.

### **PEMBAHASAN**

Kelurahan adalah wilayah kerja lurah sebagai perangkat daerah kabupaten di bawah kecamatan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada camat. Kelurahan mempunyai tugas dan fungsi melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Camat serta melaksanakan tugas pemerintahan lainnya sesuai ketentuan perundangan yang berlaku. Hubungan kerja kecamatan dengan kelurahan bersifat hierarki. Pembentukan kelurahan ditujukan untuk meningkatkan kemampuan

penyelenggaraan pemerintahan kelurahan secara berdayaguna, berhasilguna dan pelayanan terhadap masyarakat sesuai dengan tingkat perkembangan dan kemajuan pembangunan.

Kalau pengertian desa merujuk pada suatu wilayah di pedalaman/luar kota, maka pengertian kelurahan lebih pada wilayah perkotaan. Dalam UU No. 34 Tahun 1999 tentang Pemerintah Propinsi Daerah Ibukota Negara Republik Indonesia, Bab V, pasal 24 dan pasal 27 disebutkan bahwa pemerintah kelurahan terdiri dari Pemerintahan Kelurahan dan Dewan Kelurahan. Pemerintahan Kelurahan dipimpin oleh seorang lurah yang berstatus pegawai negeri sebagai eksekutif pemerintahan. Dalam tugas sehari-harinya, lurah dibantu perangkat kelurahan yang juga berstatus pegawai negeri. Lurah diangkat oleh pemerintah daerah yang dalam hal ini Gubernur.

Kinerja dalam penyelenggaraan pemerintah merupakan tanggung jawab utama seorang pemimpin, dimana pimpinan membantu bawahannya agar berprestasi lebih baik. Penilaian kinerja dilakukan dengan memberi tahu pegawai apa yang diharapkan untuk membangun pemahaman yang lebih baik satu sama lain. Penilaian harus mengenali prestasi, serta membuat rencana meningkatkan kinerja pegawai. Dengan demikian, sebenarnya terdapat hubungan yang erat antara kinerja perorangan dengan kinerja institusi.

Dalam melaksanakan kegiatan kerja, menurut masyarakat pemerintah kelurahan Pondang sudah baik. Tapi harus lebih ditingkatkan karena masih ada sedikit masyarakat yang menganggap kerja pemerintah kelurahan masih kurang. Untuk membangun kualitas kinerja pemerintahan yang efektif dan efisien diperlukan waktu untuk memikirkan bagaimana mencapai kesatuan kerjasama sehingga mampu meningkatkan kepercayaan masyarakat. Untuk itu, diperlukan otonomi serta kebebasan dalam mengambil keputusan mengalokasikan sumber daya, membuat pedoman pelayanan, anggaran, tujuan, serta target kinerja yang jelas dan terukur.

Pelayanan yang diberikan pemerintah kelurahan Pondang di Kecamatan Amurang Timur Kabupaten Minahasa Selatan terlihat masih adanya keluhan yang disampaikan masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung. Hal ini terlihat

dari masih rendahnya produktifitas kerja dan disiplin dari pegawai tersebut, serta masih kurangnya sarana kerja yang memadai. Pelayanan yang berkualitas seringkali mengalami kesulitan untuk dapat dicapai karena aparat tidak selalu memahami bagaimana cara memberikan pelayanan yang baik, hal ini terjadi disebabkan oleh masih rendahnya kemampuan profesional aparat dilihat dari latar belakang pendidikan dan etos kerja sumber daya manusia (aparat kelurahan) serta kewenangan yang dimiliki oleh aparat yang bersangkutan.

Hal ini berarti bahwa pelayanan publik oleh pemerintah semakin hari semakin bertambah dan harus lebih ditingkatkan kualitasnya. Dan alasan mendasar yang menentukan wilayah ini sebagai objek kajian adalah wilayah ini secara geografis merupakan wilayah yang berada tepat di pusat Amurang , dimana kantor bupati Minahasa Selatan dan kantor-kantor dinas lainnya berada di kelurahan Pondang. Konsekuensi lebih lanjut dari tuntutan ini mengharuskan pemerintah menyediakan aparat yang memiliki dedikasi dan disiplin tinggi serta loyalitas pengabdian yang penuh pada tugas yang menjadi tanggung jawabnya dan berorientasi pada pelayanan masyarakat sebagai abdi negara dan abdi masyarakat.

Ada beberapa bentuk partisipasi yang dapat diberikan masyarakat dalam program pembangunan, yaitu partisipasi uang, partisipasi harta benda, partisipasi tenaga, partisipasi keterampilan, partisipasi buah pikiran, partisipasi sosial, partisipasi dalam proses pengambilan keputusan, dan partisipasi representatif.

Berdasarkan hasil penelitian ini penulis berkesimpulan bahwa masyarakat tergerak untuk berpartisipasi jika:

1. Partisipasi itu dilakukan melalui organisasi yang sudah dikenal atau yang sudah ada di tengah-tengah masyarakat.
2. Partisipasi itu memberikan manfaat langsung kepada masyarakat yang bersangkutan.
3. Manfaat yang diperoleh melalui partisipasi itu dapat memenuhi kepentingan masyarakat setempat.

4. Dalam proses partisipasi itu terjamin adanya kontrol yang dilakukan oleh masyarakat. Partisipasi masyarakat ternyata berkurang jika mereka tidak atau kurang berperan dalam pengambilan keputusan.

Di akhir tahun 2012, pembangunan yang dilaksanakan di kelurahan Pondang ialah pengerasan jalan perkebunan dari lingkungan 9 sampai lingkungan 4. Biaya yang dikeluarkan berasal dari PNPM. PNPM itu berasal dari organisasi 70% dan swadaya masyarakat 30%. Masyarakat kelurahan berpartisipasi baik tenaga, pikiran, maupun biaya. Tapi ada juga yang tidak berpartisipasi dan acuh tak acuh dengan program pengerasan jalan yang pemerintah programkan.

Agenda peningkatan optimalisasi dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan pada era globalisasi seperti saat ini semakin memiliki nilai strategis untuk dibicarakan. Hal ini cukup penting, mengingat dari rangkaian pembicaraan yang terjadi, diharapkan akan memunculkan pemikiran-pemikiran, ide-ide serta gagasan-gagasan yang inovatif, kreatif serta berwawasan ke depan bagi kemajuan hubungan yang lebih erat antara pemerintah dan masyarakat. Dari pembicaraan itu juga, bisa saja ditemukan kesimpulan-kesimpulan yang baik bagi pengembangan serta peningkatan partisipasi masyarakat.

Berbagai rencana pembangunan yang dimiliki pemerintah semestinya sudah mulai mengajak partisipasi masyarakat. Karena tanpa didukung peran serta masyarakat, pembangunan yang dilaksanakan akan menjadi kurang efektif. Dari tahun ke tahun, proses pembangunan yang dilakukan pemerintah ternyata juga semakin dikritisi oleh masyarakat. Yang terpenting adalah mencari solusi yang sifatnya komprehensif dan sistematis, sehingga setiap masalah yang ada bisa diselesaikan dengan sebaik-baiknya.

## **PENUTUP**

### **A. Kesimpulan**

1. Pemerintah kelurahan Pondang dari hasil penelitian menunjukkan bahwa pemerintah telah melakukan berbagai program pembangunan di kelurahan dengan

mengikutsertakan masyarakat setempat lewat kegiatan penyuluhan langsung dan juga kegiatan yang melibatkan tokoh-tokoh agama.

2. Faktor-faktor yang dilakukan pemerintah kelurahan Pondang dalam rangka meningkatkan partisipasi masyarakat yaitu :

- a. Menggunakan media gereja, organisasi pemuda kelurahan.
- b. Penyuluhan secara langsung yang disampaikan oleh setiap kepala-kepala jaga kepada masyarakat.
- c. Menggerakkan masyarakat lewat kerja Mapalus antar warga masyarakat

## **B. Saran**

1. Masyarakat kelurahan Pondang akan semakin mengerti dan tahu perkembangan, kemajuan, dan hasil-hasil yang dicapai apabila tingkat kesadarannya tinggi. Dengan demikian mampu menyerap perubahan dan kemajuan baik berasal dari dalam maupun dari luar. Harapan-harapan baru dalam masyarakat semakin berkembang, mereka mendambakan kualitas hidup yang lebih baik, tidak lagi terbatas pada pemenuhan kebutuhan pokok seperti sandang, pangan, dan papan tetapi juga rasa aman, nyaman dan damai.

2. Dalam rangka mencapai tujuan tentunya diharapkan lebih ditingkatkan lagi peran serta pembinaan dari pemerintah dalam upaya memberikan pengaruh kepada masyarakat agar masyarakat semakin menyadari akan hak dan kewajiban dengan rasa tanggung jawab dalam berpartisipasi.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Taliziduhu Ndraha. 2003. Kybernology Ilmu Pemerintahan Baru. Jakarta: PT Rineka Cipta
- Gempur Santoso. 2005. Metodologi Penelitian. Jakarta: Prestasi Pustaka
- Inu Kencana Syafiie. 2011. Etika Pemerintahan. Jakarta: PT Rineka Cipta
- Edi Suharto. 2010. Membangun Masyarakat Memberdayakan Masyarakat. Bandung: PT Refika Aditama
- S. H. Sarundayang. 2011. Pemerintahan Daerah Di Berbagai Negara. Jakarata: Kata Hasta Pustaka

Taliziduhu Ndraha. 2011. Kybernology Ilmu Pemerintahan Baru. Jakarta: Rineka Cipta

Inu Kencana Syafie. 2011. Pengantar Ilmu Pemerintahan. Bandung: PT Refika Aditama

Josef Riwu Kaho. 2010. Prospek Otonomi Daerah Di Negara Republik Indonesia. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada

Sondang Siagian. 2012. Administrasi Pembangunan. Jakarta: PT Bumi Aksara

Undang-Undang no. 32 tahun 2004

Undang-undang Nomor 12 tahun 2008 pasal 1 butir n,

Undang-Undang Dasar 1945 pasal 29

UU No. 34 Tahun 1999